



Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo (tiga dari kanan); Koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi KPK, Agus Joko Pramono (lima dari kiri); Kepala BPKP sekaligus Pembina APIP, Muhammad Yusuf Ateh (keempat dari kiri); dan Kepala LKPP, Sarah Sadiqa (lima dari kanan) berfoto bersama dengan sejumlah pejabat lain dalam peluncuran E-Audit Katalog Versi 6 di Balai Kota Jogja, Senin (8/12).

► PENCEGAHAN KORUPSI

## KPK Luncurkan E-Audit Katalog Versi 6

Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan fitur *e-Audit* yang terintegrasi dalam *e-Katalog* versi 6 di Balai Kota Jogja, Senin (8/12). Pemanfaatan fitur ini diharapkan dapat memperkuat sistem pencegahan korupsi, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Harian Jogja  
 redaksi@harianjogja.com

Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menyambut baik hadirnya fitur tersebut. Menurutnya, teknologi pengawasan harus dibarengi kecermatan sumber daya manusia agar upaya pencegahan korupsi berjalan efektif.

"Sepandai-pandainya menjaga dengan sistem yang canggih, tetap harus jeli melihat peluang terjadinya kecurangan. Misalnya dalam lelang, harga paling rendah bisa menang, tapi kemudian diam-diam ada adendum dan sisa lelang digunakan lagi. Hal seperti itu bisa saja terjadi," katanya dalam jumpa pers peluncuran *e-Audit Katalog* versi 6 di Balai

Kota Jogja, Senin.

Menurut Hasto, *e-Audit* memungkinkan seluruh proses tercatat secara *timeline* berkelanjutan sehingga anomali dapat terdeteksi lebih cepat.

Koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi KPK, Agus Joko Pramono, menyampaikan *e-Audit* bukan hanya alat pengawasan, tetapi juga alat untuk mengurangi niat pelaku korupsi. "Korupsi tetap bergantung pada niat orang. Namun dengan fitur ini, penyimpangan akan lebih cepat terdeteksi sehingga pelaku akan berpikir tiga atau empat kali sebelum berusaha lolos dari tindak pidana korupsi,"

katanya.

Agus menjelaskan sistem akan menampilkan indikasi anomali yang bisa direspons oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk pemeriksaan lanjutan.

"Misalnya barang tayang, lalu langsung dibeli dan tiba-tiba hilang dari katalog. Itu *red flag* yang bisa langsung ditindak," ujarnya.

**Perkuat Transparansi**

Kepala BPKP sekaligus Pembina APIP, Muhammad Yusuf Ateh, menegaskan fitur ini mempersempit ruang bagi pihak yang mencoba melakukan manipulasi. "Lubang untuk kecurangan sudah makin kecil. Dengan alat ini, semua bisa dicek dengan cepat. Saya optimis ini akan memperkecil peluang pelanggaran," katanya.

Sementara Kepala LKPP, Sarah Sadiqa, menegaskan *e-Audit* merupakan *tools* baru yang

- Dengan fitur ini, penyimpangan akan lebih cepat terdeteksi sehingga pelaku akan berpikir ulang untuk korupsi.
- Fitur ini diharapkan dapat memperkuat transparansi dan integritas pengadaan barang dan jasa.

ditempelkan pada *e-Katalog* versi 6. Fitur ini berfungsi sebagai *early warning system* berbasis data. "Misalnya proses nego biasanya dua hari, tapi selesai satu menit. Itu perlu dicek. Belum tentu salah, tapi tanda tanya itu harus ditelusuri," ujarnya.

Menurutnya, efektivitas *e-Audit* sangat bergantung pada pemanfaatan aktif oleh admin pengelola. Dia berharap fitur ini dapat memperkuat transparansi dan integritas pengadaan barang dan jasa, mengurangi risiko korupsi, serta mempercepat respons pengawasan melalui data otomatis dan terstruktur.

(Stefani Yulindriani/\*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 13 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005